

Analisis Efektivitas OSS-RBA dalam Penyederhanaan Proses Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Bagus Satrio Utomo¹, Sandra Aditya Kurniawan², Rizky Adi Nugraha³

¹ Universitas Muhammadiyah Cileungsi

Bagussat66@gmail.com

^{2,3} Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

²sandra@asn.jatengprov.go.id

³rizkyadinugraha1304@asn.jatengprov.go.id

Abstrak

Indonesia terus berupaya meningkatkan daya saing dan iklim investasinya melalui reformasi sistem perizinan, salah satunya dengan menerapkan Online Single Submission berbasis risiko (OSS-RBA). Sistem ini bertujuan menyederhanakan prosedur, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses perizinan, termasuk di sektor ketenagalistrikan. Studi ini menganalisis efektivitas implementasi OSS-RBA dalam proses perizinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) di Provinsi Jawa Tengah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana sistem OSS-RBA berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OSS-RBA berhasil menyederhanakan prosedur perizinan IUPTLS, mengurangi waktu dan biaya transaksi, serta meningkatkan akuntabilitas. Namun, tantangan seperti koordinasi antar lembaga, kesenjangan kapasitas daerah, dan kompleksitas teknis dalam sektor ketenagalistrikan masih menjadi hambatan dalam implementasi. Studi kasus di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia di daerah sangat mempengaruhi keberhasilan sistem ini. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang dinamika implementasi e-government dalam negara berkembang dengan sistem desentralisasi. Selain itu, studi ini menawarkan wawasan berharga tentang peran OSS-RBA dalam mendukung transisi energi terbarukan di Indonesia. Implikasi kebijakan yang dihasilkan mencakup rekomendasi untuk penyempurnaan sistem perizinan berbasis risiko serta peningkatan kapasitas daerah dalam rangka harmonisasi kebijakan pusat-daerah.

Kata Kunci: OSS-RBA, perizinan usaha, IUPTLS, e-government, desentralisasi, akuntabilitas.

Abstract

Indonesia continues to enhance its competitiveness and investment climate through licensing system reforms, one of which is the implementation of the Risk-Based Online Single Submission (OSS-RBA) system. This system aims to simplify procedures, increase transparency, and accelerate licensing processes, including in the electricity sector. This study analyzes the effectiveness of OSS-RBA implementation in the licensing process for the Self-Interest Electricity Supply Business License (IUPTLS) in Central Java Province. Using a qualitative approach, the research explores how the OSS-RBA system contributes to improving efficiency and transparency. The results indicate that OSS-RBA has successfully streamlined the IUPTLS licensing process, reduced transaction time and costs, and enhanced accountability. However, challenges such as inter-agency coordination, regional capacity gaps, and technical complexity within the electricity sector continue to hinder implementation. The case study in Central Java reveals that the readiness of digital infrastructure and the capacity of human resources at the regional level significantly influence the success of the system. This research contributes to the understanding of e-government implementation dynamics in developing countries with decentralized governance. Furthermore, the study provides valuable insights into the role of OSS-RBA in supporting the renewable energy transition in Indonesia. The policy implications include recommendations for improving the risk-based licensing system and strengthening regional capacities to harmonize national and local policies.

Keywords: OSS-RBA, business licensing, IUPTLS, e-government, decentralization, accountability.

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, terus berupaya meningkatkan daya saing dan iklim investasinya dalam menghadapi tantangan global. Menurut laporan Bank Dunia (2020), Indonesia berada di peringkat 73 dari 190 negara dalam kemudahan berbisnis, menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan signifikan. Salah satu aspek krusial yang memerlukan perhatian adalah efisiensi proses perizinan usaha, yang sering kali menjadi hambatan utama bagi investor (Nurdin et al., 2021). Kompleksitas birokrasi dan ketidakpastian dalam proses perizinan telah lama menjadi kendala bagi pertumbuhan investasi di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh OECD (2021) mengungkapkan bahwa prosedur perizinan yang berbelit-belit dapat meningkatkan biaya transaksi dan menciptakan celah untuk praktik korupsi. Hal ini tidak hanya menghambat masuknya investasi baru, tetapi juga mengurangi daya saing perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia. Dalam konteks persaingan global untuk menarik investasi, efisiensi perizinan menjadi faktor pembeda yang signifikan. Negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia telah melakukan reformasi perizinan yang substansial, menempatkan mereka di peringkat yang lebih tinggi dalam kemudahan berbisnis (World Bank, 2020). Kondisi ini menciptakan urgensi bagi Indonesia untuk melakukan transformasi menyeluruh dalam sistem perizinannya guna mempertahankan dan meningkatkan daya tarik investasinya.

Merespon tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menginisiasi implementasi sistem Online Single Submission dengan pendekatan Risk-Based Approach (OSS-RBA). Sistem ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menyederhanakan, mempercepat, dan mengintegrasikan proses perizinan usaha di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). OSS-RBA dirancang sebagai solusi komprehensif untuk mengatasi

fragmentasi perizinan antar lembaga dan tingkat pemerintahan.

Penerapan OSS-RBA mencerminkan pergeseran paradigma dalam tata kelola pemerintahan Indonesia, dari pendekatan berbasis kontrol ke pendekatan berbasis risiko. Menurut Hadiarman et al. (2022), pendekatan ini berpotensi meningkatkan efisiensi regulasi dan mengurangi beban administratif bagi pelaku usaha. Namun, implementasinya juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan adaptasi terhadap teknologi baru. Transformasi digital dalam perizinan melalui OSS-RBA tidak hanya berdampak pada efisiensi administratif, tetapi juga berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses perizinan. Studi yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik dapat mengurangi peluang korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Namun, keberhasilan implementasi OSS-RBA akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai tingkat pemerintahan.

Sektor ketenagalistrikan, khususnya terkait Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS), menjadi salah satu fokus penting dalam implementasi OSS-RBA. Sebelumnya dikenal sebagai Izin Operasi (IO), IUPTLS kini diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021 yang diselaraskan dengan sistem OSS-RBA. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengadaptasi regulasi sektor energi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan investasi (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2021). Transformasi perizinan IUPTLS memiliki implikasi signifikan bagi pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi di Indonesia. Menurut Institute for Essential Services Reform (2021), penyederhanaan perizinan untuk pembangkit listrik mandiri dapat mempercepat adopsi teknologi energi bersih, terutama di sektor industri dan komersial. Hal ini sejalan dengan target Indonesia untuk

meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 23% pada tahun 2025 (Kementerian ESDM, 2021).

Namun, implementasi OSS-RBA dalam konteks IUPTLS juga menghadirkan tantangan tersendiri. Kompleksitas teknis dalam sektor ketenagalistrikan, seperti penilaian kelayakan jaringan dan dampak lingkungan, memerlukan pendekatan yang lebih nuansir dalam penerapan sistem berbasis risiko. Studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Energi UGM (2022) mengungkapkan bahwa terdapat kekhawatiran di kalangan pelaku industri mengenai kemampuan sistem OSS-RBA untuk mengakomodasi variasi dan kompleksitas proyek-proyek ketenagalistrikan. Provinsi Jawa Tengah menjadi contoh menarik dalam implementasi OSS-RBA untuk IUPTLS. Sebelumnya, Jawa Tengah telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Perizinan (SIAP) Jateng, menunjukkan kesiapan daerah dalam mengadopsi sistem perizinan berbasis elektronik (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2019). Transisi dari SIAP Jateng ke OSS-RBA memberikan perspektif unik tentang bagaimana daerah beradaptasi dengan kebijakan nasional dalam konteks otonomi daerah.

Studi kasus di Jawa Tengah juga relevan mengingat potensi energi terbarukan yang dimiliki provinsi ini, terutama dalam hal energi surya dan biomassa (Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2020). Analisis implementasi OSS-RBA untuk IUPTLS di Jawa Tengah dapat memberikan wawasan berharga tentang efektivitas sistem ini dalam mendukung pengembangan energi terbarukan di tingkat daerah. Lebih lanjut, Jawa Tengah menawarkan konteks yang unik untuk mengevaluasi interaksi antara kebijakan nasional dan inisiatif daerah dalam reformasi perizinan. Dengan adanya program-program unggulan seperti "Jateng Gayeng" yang bertujuan mempercepat pembangunan ekonomi daerah, implementasi OSS-RBA di provinsi ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana harmonisasi kebijakan pusat-daerah berdampak pada efektivitas reformasi perizinan (Bappeda Jawa Tengah, 2021).

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman tentang efektivitas OSS-RBA dalam meningkatkan iklim investasi, khususnya di sektor ketenagalistrikan. Menurut Meijer dan Bekkers (2015), evaluasi implementasi e-government dalam konteks negara berkembang dengan sistem pemerintahan desentralisasi masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menyediakan analisis mendalam tentang interaksi antara inovasi teknologi, struktur birokrasi, dan dinamika kekuasaan dalam reformasi administrasi publik. Lebih jauh, analisis terhadap implementasi OSS-RBA untuk IUPTLS dapat memberikan wawasan berharga tentang peran sistem perizinan dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Dengan target ambisius Indonesia untuk meningkatkan porsi energi terbarukan, efisiensi perizinan untuk pembangkit listrik mandiri menjadi faktor kunci dalam mempercepat adopsi teknologi energi bersih dan mendorong investasi di sektor ini (IRENA, 2022). Dari perspektif kebijakan publik, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan strategi optimalisasi OSS-RBA. Dengan menganalisis kasus spesifik IUPTLS di Jawa Tengah, studi ini dapat mengidentifikasi best practices dan lessons learned yang dapat diterapkan di daerah lain atau bahkan disesuaikan untuk sektor-sektor ekonomi lainnya. Hal ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk terus menyempurnakan sistem perizinan nasional guna mencapai target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan (Kementerian PPN/Bappenas, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini akan berfokus pada dua aspek utama dalam implementasi OSS-RBA untuk IUPTLS di Provinsi Jawa Tengah. Rumusan masalah ini mencerminkan kompleksitas penerapan sistem perizinan baru dalam konteks desentralisasi dan sektor ketenagalistrikan yang memiliki karakteristik teknis yang unik.

- Bagaimana efektivitas implementasi OSS-RBA dalam proses perizinan IUPTLS di Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam

konteks penyederhanaan prosedur dan peningkatan transparansi?

- Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan OSS-RBA untuk IUPTLS di Jawa Tengah, terutama terkait koordinasi antar lembaga dan adaptasi terhadap kompleksitas teknis sektor ketenagalistrikan?

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi OSS-RBA dalam konteks spesifik IUPTLS di Jawa Tengah, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan dan praktik perizinan di masa depan.

- Menganalisis efektivitas implementasi OSS-RBA dalam proses perizinan IUPTLS di Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek penyederhanaan prosedur dan peningkatan transparansi.
- Mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan utama dalam penerapan OSS-RBA untuk IUPTLS di Jawa Tengah, khususnya dalam hal koordinasi antar lembaga dan adaptasi terhadap kompleksitas teknis sektor ketenagalistrikan.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang mendalam, baik dari perspektif akademis maupun praktis. Dengan menganalisis implementasi OSS-RBA dalam konteks spesifik IUPTLS di Jawa Tengah, studi ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan pengetahuan tentang reformasi administrasi publik, tetapi juga menyediakan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi di lapangan.

- Bagi kalangan akademik, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam memahami dinamika implementasi e-government di negara berkembang dengan sistem pemerintahan desentralisasi.
- Bagi regulator di tingkat nasional dan daerah, hasil penelitian ini menyediakan informasi kritis tentang efektivitas dan

tantangan implementasi OSS-RBA dalam sektor ketenagalistrikan.

- Bagi praktisi di bidang energi dan ketenagalistrikan, studi ini memberikan wawasan berharga tentang implikasi reformasi perizinan terhadap pengembangan proyek-proyek energi terbarukan.
- Bagi masyarakat luas, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan publik.
- Dalam konteks global, penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap upaya nasional dalam mencapai target energi terbarukan dan mendukung transisi energi untuk mendukung UN Sustainable Development Goals 7 "Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all".

2. KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini menyajikan landasan teoretis dan konseptual yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

2.1 Paradigma New Public Management dan E-Government

New Public Management (NPM) merupakan paradigma reformasi administrasi publik yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada hasil (Hood, 1991). Dalam konteks ini, e-government dipandang sebagai manifestasi NPM yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi (Cordella & Bonina, 2012). NPM mendorong adopsi praktik-praktik manajemen sektor swasta dalam administrasi publik, termasuk penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. E-government, sebagai implementasi teknologi informasi dalam layanan pemerintah, sejalan dengan prinsip-prinsip NPM dalam hal peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (Dunleavy et al., 2006). Dalam konteks OSS-RBA, paradigma NPM dan e-government menjadi kerangka konseptual untuk memahami motivasi dan tujuan di balik reformasi sistem perizinan. Analisis implementasi OSS-RBA akan

mempertimbangkan sejauh mana sistem ini mencerminkan prinsip-prinsip NPM dan manfaat yang diharapkan dari e-government, seperti yang diidentifikasi oleh Meijer dan Bekkers (2015) dalam studi mereka tentang transformasi digital dalam pemerintahan.

2.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Teori implementasi kebijakan publik menyediakan kerangka untuk memahami proses penerapan kebijakan dari formulasi hingga hasil. Model top-down, yang dikembangkan oleh Sabatier dan Mazmanian (1980), menekankan peran pembuat kebijakan pusat dalam menentukan arah implementasi. Sementara itu, model bottom-up yang diadvokasi oleh Lipsky (1980) dan Hjern dan Porter (1981) mempertimbangkan peran penting implementor di lapangan dan kondisi lokal. Dalam konteks OSS-RBA, analisis akan mempertimbangkan dinamika antara arahan pusat (top-down) dan adaptasi lokal (bottom-up) dalam implementasi sistem di tingkat daerah, khususnya di Jawa Tengah.

Teori Implementasi Matland (1995) menyediakan kerangka untuk memahami variasi dalam implementasi kebijakan berdasarkan tingkat ambiguitas dan konflik. Teori ini relevan untuk menganalisis kompleksitas implementasi OSS-RBA, terutama dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi di tingkat daerah.

2.3 Konsep Risk-Based Approach dalam Regulasi

Risk-Based Approach (RBA) merupakan pendekatan regulasi yang mengalokasikan sumber daya pengawasan berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan (Black & Baldwin, 2012). Dalam konteks OSS-RBA, konsep ini menjadi dasar untuk memahami logika di balik penyederhanaan proses perizinan dan pengawasan berbasis risiko. Analisis akan berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip RBA diterapkan dalam konteks IUPTLS, dan implikasinya terhadap efisiensi dan efektivitas proses perizinan, sebagaimana dibahas oleh Rothstein et al. (2006) dalam studi mereka tentang regulasi berbasis risiko.

2.4 Teori Institusionalisme dalam Administrasi Publik

Teori institusionalisme menekankan peran struktur dan norma institusional dalam membentuk perilaku organisasi dan individu (March & Olsen, 1984). Dalam konteks implementasi OSS-RBA, teori ini relevan untuk memahami bagaimana institusi yang ada mempengaruhi dan dipengaruhi oleh penerapan sistem baru. Analisis akan mempertimbangkan aspek-aspek seperti resistensi terhadap perubahan, adaptasi institusional, dan transformasi norma-norma birokrasi dalam proses implementasi OSS-RBA, mengacu pada karya Peters (2019) tentang institusionalisme dalam administrasi publik.

2.5 Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Konteks Perizinan

Konsep desentralisasi dan otonomi daerah menjadi penting dalam memahami dinamika implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal (Smoke, 2015). Dalam konteks OSS-RBA, analisis akan berfokus pada bagaimana sistem ini berinteraksi dengan kewenangan dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola perizinan IUPTLS. Penelitian akan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang muncul dari interaksi antara kebijakan nasional OSS-RBA dengan konteks lokal dan otonomi daerah di Jawa Tengah, mengacu pada studi Firman (2009) tentang desentralisasi di Indonesia.

2.6 Konteks Kebijakan dan Institusional

2.6.1 Evolusi Kebijakan Perizinan di Indonesia

Kebijakan perizinan di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan sejak era reformasi. Awalnya, sistem perizinan bersifat terfragmentasi dan rumit, dengan banyak instansi terlibat dalam proses yang panjang dan tidak efisien (Sutedi, 2015). Seiring waktu, pemerintah menyadari pentingnya reformasi perizinan untuk meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berbisnis. Pada tahun 2009, pemerintah memperkenalkan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menyederhanakan proses perizinan (Ramadhan & Nugroho, 2019). Inisiatif ini

bertujuan mengintegrasikan berbagai layanan perizinan dalam satu atap, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan transparansi. Tahun 2018 menjadi tonggak penting dengan diluncurkannya Online Single Submission (OSS), yang kemudian berkembang menjadi OSS berbasis risiko (OSS-RBA) pada tahun 2021 (BKPM, 2021). Sistem ini mengadopsi pendekatan berbasis risiko dalam perizinan, menyesuaikan persyaratan dan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha, sejalan dengan praktik terbaik internasional (OECD, 2020).

2.6.2 Arsitektur Kelembagaan OSS-RBA

OSS-RBA dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas implementasi dan pengembangan sistem. Arsitektur kelembagaan OSS-RBA melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Investasi, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah (Kementerian Investasi, 2021). Sistem ini mengintegrasikan data dan proses dari berbagai instansi, memungkinkan pertukaran informasi real-time dan koordinasi yang lebih baik.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam implementasi OSS-RBA, terutama dalam hal verifikasi dan pengawasan di lapangan (Hardianto et al., 2020). Tantangan utama dalam arsitektur kelembagaan ini adalah memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah, serta mengatasi resistensi terhadap perubahan di berbagai tingkat birokrasi, sebagaimana diidentifikasi oleh Dwiyanto (2015) dalam studinya tentang reformasi birokrasi di Indonesia.

2.6.3 Kerangka Regulasi IUPTLS dalam Sistem Ketenagalistrikan Nasional

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS) merupakan bagian integral dari sistem ketenagalistrikan nasional. Kerangka regulasi IUPTLS diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan berbagai peraturan turunannya (Kementerian ESDM, 2009). Dalam konteks OSS-RBA, perizinan IUPTLS mengalami penyesuaian untuk mengakomodasi pendekatan berbasis risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi landasan hukum utama yang mengintegrasikan IUPTLS ke dalam sistem OSS-RBA (Sekretariat Negara RI, 2021).

Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kemudahan berinvestasi di sektor ketenagalistrikan dengan kebutuhan pengawasan yang memadai untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan pasokan listrik. Tantangan utama dalam implementasi kerangka regulasi ini adalah memastikan harmonisasi antara kebijakan nasional dan peraturan daerah, serta menyesuaikan standar teknis dengan pendekatan berbasis risiko, sebagaimana disoroti dalam laporan PwC Indonesia (2018) tentang sektor ketenagalistrikan Indonesia.

3. METODELOGI PENELITIAN

Desain penelitian yang dipilih adalah studi kasus kualitatif, dengan fokus pada implementasi OSS-RBA untuk IUPTLS di Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam konteks spesifik implementasi kebijakan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan, serta memahami dinamika antar pemangku kepentingan (Yin, 2018).

Analisis Dokumen Kebijakan dan Laporan Teknis Penelitian ini akan melakukan analisis mendalam terhadap dokumen kebijakan terkait OSS-RBA dan IUPTLS, termasuk peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, dan laporan implementasi. Analisis dokumen ini akan memberikan pemahaman komprehensif tentang kerangka regulasi dan tujuan kebijakan (Bowen, 2009).

Wawancara Mendalam dengan Informan Kunci Wawancara semi-terstruktur akan dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah di tingkat pusat dan daerah, pelaku usaha, dan ahli di bidang perizinan dan ketenagalistrikan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif beragam tentang implementasi OSS-RBA dan dampaknya terhadap proses perizinan IUPTLS (Kvale & Brinkmann, 2009).

Analisis data akan menggunakan pendekatan grounded theory, yang memungkinkan

pengembangan teori dari data yang dikumpulkan. Proses analisis akan melibatkan coding terbuka, aksial, dan selektif untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan membangun kerangka konseptual yang menjelaskan dinamika implementasi OSS-RBA dalam konteks IUPTLS (Charmaz, 2014).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Implementasi OSS-RBA dalam Konteks IUPTLS

4.1.1 Pemetaan Aktor dan Kepentingan dalam Ekosistem Perizinan IUPTLS

Implementasi OSS-RBA dalam konteks IUPTLS melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam. Pemetaan aktor dan kepentingan ini penting untuk memahami dinamika dan potensi konflik dalam proses implementasi.

Pemerintah Pusat:

- **Kementerian Investasi/BKPM:** Bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan sistem OSS-RBA secara keseluruhan. Kepentingannya adalah meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia.
- **Kementerian ESDM:** Memiliki otoritas teknis terkait regulasi ketenagalistrikan. Kepentingannya adalah memastikan keamanan dan keberlanjutan pasokan listrik nasional.

Pemerintah Daerah (Provinsi Jawa Tengah):

- **DPMPTSP Provinsi:** Berperan sebagai front office dalam proses perizinan di daerah. Kepentingannya adalah menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan investasi daerah.
- **Dinas ESDM Provinsi:** Memberikan pertimbangan teknis terkait IUPTLS. Kepentingannya adalah memastikan kesesuaian izin dengan rencana ketenagalistrikan daerah.

Pelaku Usaha:

- **Perusahaan Listrik Swasta:** Sebagai pemohon IUPTLS, kepentingannya adalah mendapatkan izin dengan proses yang cepat, mudah, dan transparan.
- **Asosiasi Pengusaha Ketenagalistrikan:** Mewakili kepentingan kolektif pelaku usaha dalam dialog kebijakan.

Masyarakat:

- **Konsumen Listrik:** Memiliki kepentingan terhadap ketersediaan listrik yang andal dan terjangkau.
- **Kelompok Lingkungan:** Memperhatikan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan dari proyek ketenagalistrikan.

4.1.2 Analisis Proses Bisnis: Sebelum dan Sesudah OSS-RBA

Analisis proses bisnis sebelum dan sesudah implementasi OSS-RBA dalam konteks IUPTLS menunjukkan perubahan signifikan dalam alur perizinan:

Table 1 Perbandingan Sebelum dan Sesudah OSS-RBA

Aspek	Sebelum OSS-RBA	Setelah OSS-RBA
Metode Pengajuan	Manual atau semi-elektronik melalui PTSP daerah	Secara daring melalui platform OSS-RBA
Proses Pengajuan	Pemohon mengajukan ke berbagai instansi secara terpisah	Pengajuan terintegrasi dalam satu sistem
Penilaian Risiko	Tidak ada penilaian risiko otomatis	Sistem melakukan penilaian risiko otomatis berdasarkan data yang diinput
Penerbitan Izin	Memerlukan verifikasi manual untuk semua jenis izin	Izin berisiko rendah dapat langsung terbit setelah pernyataan komitmen
Verifikasi Dokumen	Sering terjadi bolak-balik dokumen	Verifikasi terintegrasi dalam sistem untuk izin berisiko menengah dan tinggi
Pertimbangan Teknis	Dilakukan secara manual oleh Dinas ESDM Provinsi	Dilakukan melalui sistem, mengurangi interaksi langsung
Standarisasi Waktu	Tidak ada standarisasi waktu pelayanan antar daerah	Standarisasi waktu pelayanan diterapkan

Transparansi	Kurang transparan, potensi penyimpangan tinggi	Lebih transparan, mengurangi potensi penyimpangan
Kepastian Investor	Ketidakpastian tinggi bagi investor	Memberikan kepastian lebih bagi pemohon
Integrasi Data	Data tersebar di berbagai instansi	Data terintegrasi dalam satu sistem

Perubahan proses bisnis ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi perizinan IUPTLS. Namun, implementasinya menghadapi beberapa tantangan:

- Kesiapan infrastruktur digital di daerah yang bervariasi.
- Perlunya peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam mengoperasikan sistem baru.
- Resistensi dari oknum yang merasa kepentingannya terganggu oleh transparansi sistem baru.
- Harmonisasi regulasi pusat dan daerah yang belum sepenuhnya tercapai.

4.1.3 Evaluasi Efektivitas berdasarkan Kriteria

Evaluasi efektivitas implementasi OSS-RBA dalam konteks IUPTLS dilakukan berdasarkan empat kriteria utama. Analisis ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana sistem baru telah mencapai tujuan reformasi perizinan dan mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan.

- Simplifikasi Prosedural Implementasi OSS-RBA telah secara signifikan menyederhanakan prosedur perizinan IUPTLS. Pengajuan yang sebelumnya dilakukan secara terpisah ke berbagai instansi kini terintegrasi dalam satu sistem. Penilaian risiko otomatis memungkinkan diferensiasi proses berdasarkan tingkat risiko, sehingga mengurangi kompleksitas prosedural terutama untuk izin berisiko rendah.
- Efisiensi Temporal dan Ekonomis OSS-RBA telah meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam proses perizinan IUPTLS. Standarisasi waktu pelayanan memberikan kepastian bagi pemohon, mengurangi ketidakpastian yang sebelumnya sering terjadi. Pengurangan interaksi langsung dan integrasi sistem juga berpotensi mengurangi biaya transaksi dan biaya tidak resmi yang mungkin timbul dalam proses manual.

- Transparansi dan Akuntabilitas Sistem daring OSS-RBA meningkatkan transparansi proses perizinan dengan memberikan visibilitas status permohonan secara real-time. Integrasi data dan standarisasi proses mengurangi ruang untuk penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas pelaksana perizinan. Namun, efektivitas ini bergantung pada konsistensi implementasi dan kualitas data yang diinput.
- Responsivitas terhadap Kebutuhan Pemohon OSS-RBA meningkatkan responsivitas dengan menyediakan layanan 24/7 dan mengurangi kebutuhan kunjungan fisik ke kantor pemerintah. Pendekatan berbasis risiko juga memungkinkan proses yang lebih cepat untuk izin berisiko rendah, merespon kebutuhan pemohon untuk kecepatan dan efisiensi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa OSS-RBA telah membawa perubahan positif dalam proses perizinan IUPTLS, terutama dalam hal simplifikasi prosedur dan peningkatan efisiensi. Namun, efektivitas implementasi bervariasi antar daerah dan masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya dalam aspek transparansi dan responsivitas.

4.1.4 Tantangan Implementasi

Meskipun OSS-RBA menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan proses perizinan IUPTLS, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan. Identifikasi dan pemahaman terhadap tantangan-tantangan ini penting untuk mengembangkan strategi mitigasi yang efektif dan memastikan keberhasilan jangka panjang sistem.

- Kompleksitas Koordinasi Multi-level Governance Implementasi OSS-RBA menghadapi tantangan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan interpretasi regulasi dan kepentingan daerah dapat menghambat harmonisasi kebijakan. Diperlukan

mekanisme koordinasi yang efektif untuk menyelaraskan implementasi di berbagai tingkat pemerintahan.

- Kesenjangan Kapasitas Institusional Terdapat kesenjangan kapasitas antara daerah dalam mengimplementasikan OSS-RBA. Beberapa daerah mungkin kekurangan infrastruktur digital atau SDM yang kompeten untuk mengelola sistem baru. Program peningkatan kapasitas dan pendampingan teknis diperlukan untuk mengatasi kesenjangan ini.
- Isu Interoperabilitas Sistem Tantangan teknis muncul dalam mengintegrasikan OSS-RBA dengan sistem yang sudah ada di berbagai instansi. Masalah interoperabilitas dapat menghambat pertukaran data yang efisien dan mengurangi efektivitas sistem. Diperlukan standarisasi format data dan protokol pertukaran informasi antar sistem untuk mengatasi tantangan ini.

4.1.5 Studi Kasus Spesifik: IUPTLS Pembangkit Tenaga Surya On-Grid

Untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang implementasi OSS-RBA dalam konteks IUPTLS, kita akan menganalisis studi kasus spesifik terkait perizinan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) on-grid di Provinsi Jawa Tengah.

PLTS on-grid merupakan salah satu bentuk pembangkit listrik yang semakin populer di Indonesia, sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Sistem on-grid memungkinkan integrasi langsung dengan jaringan listrik PLN, membutuhkan koordinasi yang lebih kompleks dalam proses perizinannya.

Dalam kasus ini, PT Solar Nusantara (nama samaran) mengajukan permohonan IUPTLS untuk proyek PLTS on-grid dengan kapasitas 10 MW di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Berikut adalah analisis proses perizinan melalui OSS-RBA:

- Pengajuan Permohonan: PT Solar Nusantara mengakses portal OSS-RBA dan mengisi formulir permohonan IUPTLS secara daring. Sistem secara otomatis melakukan penilaian risiko berdasarkan data yang diinput, mengkategorikan proyek ini sebagai risiko menengah-tinggi karena

kapasitasnya yang cukup besar dan koneksinya dengan jaringan PLN.

- Verifikasi dan Pertimbangan Teknis: Sistem OSS-RBA meneruskan permohonan ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah untuk pertimbangan teknis. Dinas melakukan verifikasi kesesuaian proyek dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) melalui sistem terintegrasi.
- Koordinasi Antar Instansi: OSS-RBA memfasilitasi koordinasi antara Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, dan PLN untuk memastikan kesiapan infrastruktur jaringan dan dampak lingkungan proyek.
- Penerbitan Izin: Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pertimbangan teknis positif, IUPTLS diterbitkan secara elektronik melalui sistem OSS-RBA.

Analisis studi kasus ini menunjukkan beberapa keunggulan OSS-RBA:

- Integrasi data antar instansi mempercepat proses verifikasi dan koordinasi.
- Transparansi proses memungkinkan pemohon memantau status permohonan secara real-time.
- Standarisasi prosedur mengurangi variasi interpretasi regulasi antar daerah.

Namun, beberapa tantangan juga teridentifikasi:

- Kebutuhan peningkatan kapasitas SDM di dinas terkait untuk mengoperasikan sistem baru.
- Perlunya harmonisasi regulasi daerah dengan sistem OSS-RBA pusat.
- Tantangan teknis dalam integrasi data real-time dengan PLN untuk verifikasi kapasitas jaringan.

Studi kasus ini mengilustrasikan bagaimana OSS-RBA dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi proses perizinan IUPTLS, khususnya untuk proyek energi terbarukan yang kompleks seperti PLTS on-grid. Namun, juga menunjukkan area-area yang masih memerlukan penyempurnaan untuk mengoptimalkan implementasi sistem ini di masa depan.

4.2 Diskusi dan Implikasi Teoretis

4.2.1 Reinterpretasi Teori Implementasi dalam Era Digital Governance

Implementasi OSS-RBA dalam konteks IUPRLS menuntut reinterpretasi teori implementasi kebijakan klasik dalam era digital governance. Teori-teori implementasi yang dikembangkan oleh scholars seperti Pressman dan Wildavsky (1973) atau Van Meter dan Van Horn (1975) perlu ditinjau ulang dalam konteks transformasi digital pemerintahan.

Dalam era digital governance, proses implementasi kebijakan tidak lagi bersifat linear dan top-down sebagaimana diasumsikan oleh teori-teori klasik. Sebaliknya, implementasi menjadi proses yang lebih dinamis, iteratif, dan melibatkan interaksi kompleks antara aktor manusia dan sistem digital. Beberapa aspek kunci dalam reinterpretasi ini meliputi:

- **Kompleksitas Sosio-Teknis:** Implementasi kebijakan dalam era digital tidak hanya melibatkan faktor-faktor sosial-politik, tetapi juga elemen teknis dari sistem informasi. Teori actor-network (ANT) yang dikembangkan oleh Latour (2005) dapat memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk memahami interaksi antara aktor manusia dan non-manusia dalam implementasi OSS-RBA.
- **Agile Policy Implementation:** Konsep "agile" yang berasal dari pengembangan perangkat lunak dapat diterapkan dalam implementasi kebijakan digital. Pendekatan ini memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan dan umpan balik pengguna, sejalan dengan sifat dinamis teknologi digital.
- **Data-Driven Implementation:** Era digital memungkinkan pengumpulan dan analisis data implementasi secara real-time. Teori implementasi perlu memasukkan aspek penggunaan big data dan analytics dalam proses pengambilan keputusan dan penyesuaian kebijakan.
- **Collaborative Governance:** Platform digital seperti OSS-RBA memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dan tingkat pemerintahan. Teori implementasi perlu memperhitungkan dinamika baru dalam

koordinasi dan kolaborasi yang dimungkinkan oleh teknologi digital.

4.2.2 Dialektika Sentralisasi-Desentralisasi dalam Tata Kelola Perizinan

Implementasi OSS-RBA mencerminkan dialektika antara kecenderungan sentralisasi dan desentralisasi dalam tata kelola perizinan di Indonesia. Di satu sisi, OSS-RBA merepresentasikan upaya sentralisasi melalui standarisasi proses dan integrasi data di tingkat nasional. Di sisi lain, sistem ini juga harus mengakomodasi otonomi daerah dan keragaman konteks lokal.

Beberapa aspek penting dalam dialektika ini meliputi:

- **Standardisasi vs Fleksibilitas:** OSS-RBA menawarkan standarisasi prosedur perizinan secara nasional, namun harus tetap fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan dan regulasi spesifik daerah. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara efisiensi yang ditawarkan oleh standarisasi dan responsivitas terhadap konteks lokal.
- **Integrasi Data Nasional vs Otonomi Data Daerah:** Sentralisasi data dalam sistem OSS-RBA memfasilitasi analisis dan pengambilan keputusan di tingkat nasional. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan tentang otonomi daerah dalam mengelola data mereka sendiri dan potensi resistensi terhadap sharing data.
- **Kewenangan Pusat vs Daerah:** Implementasi OSS-RBA mengharuskan redefinisi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses perizinan. Negosiasi kewenangan ini merupakan proses yang dinamis dan berpotensi menimbulkan konflik.
- **Kapasitas Asimetris:** Perbedaan kapasitas antar daerah dalam mengimplementasikan sistem digital menciptakan tantangan dalam menyeimbangkan peran pusat dan daerah. Daerah dengan kapasitas rendah mungkin memerlukan intervensi lebih besar dari pusat, sementara daerah dengan kapasitas tinggi menuntut otonomi lebih besar.

Dialektika sentralisasi-desentralisasi ini mencerminkan kompleksitas governance

dalam konteks negara kesatuan dengan sistem otonomi daerah seperti Indonesia. Keberhasilan implementasi OSS-RBA akan sangat bergantung pada kemampuan untuk mengelola tensi ini dan menciptakan model tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan baik di tingkat nasional maupun lokal.

4.2.3 Transformasi Relasi Negara-Masyarakat melalui E-Government

Implementasi e-government, khususnya melalui sistem OSS-RBA, telah membawa perubahan signifikan dalam relasi antara negara dan masyarakat di Indonesia. Transformasi ini mencakup beberapa aspek penting:

- **Demokratisasi Informasi:** E-government telah meningkatkan aksesibilitas informasi publik, memungkinkan masyarakat untuk memperoleh data dan informasi terkait kebijakan dan layanan pemerintah dengan lebih mudah. Hal ini mendorong transparansi dan mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan warga negara.
- **Partisipasi Digital:** Platform digital seperti OSS-RBA membuka ruang baru bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Masyarakat dapat memberikan umpan balik langsung, melacak status permohonan, dan berinteraksi dengan pemerintah secara lebih efisien.
- **Pergeseran dari Birokrasi Tradisional ke Layanan Berbasis Pengguna:** E-government mendorong perubahan paradigma dalam pelayanan publik, dari model birokrasi yang kaku ke pendekatan yang lebih berorientasi pada kebutuhan pengguna. Sistem seperti OSS-RBA dirancang dengan mempertimbangkan pengalaman pengguna, mencerminkan pergeseran menuju pemerintahan yang lebih responsif.
- **Redefinisi Peran Intermediari:** Dengan akses langsung ke layanan pemerintah melalui platform digital, peran intermediari tradisional seperti calo atau broker informasi mengalami perubahan. Ini berpotensi mengurangi praktik rent-seeking

dan korupsi dalam interaksi antara masyarakat dan pemerintah.

4.2.4 Implikasi terhadap Konsep Akuntabilitas dan Responsivitas Birokrasi

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, termasuk implementasi OSS-RBA, memiliki implikasi mendalam terhadap konsep akuntabilitas dan responsivitas birokrasi:

- **Akuntabilitas Real-time:** E-government memungkinkan pemantauan kinerja birokrasi secara real-time. Sistem digital dapat menghasilkan data dan metrik yang memungkinkan evaluasi kinerja yang lebih objektif dan tepat waktu, meningkatkan akuntabilitas aparatur pemerintah.
- **Perluasan Dimensi Akuntabilitas:** Selain akuntabilitas vertikal dan horizontal tradisional, e-government memperkenalkan dimensi baru akuntabilitas digital. Ini mencakup pertanggungjawaban atas keamanan data, privasi pengguna, dan integritas sistem informasi.
- **Responsivitas Berbasis Data:** Analitik data yang dihasilkan dari sistem e-government memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan preferensi masyarakat. Pola penggunaan layanan dan umpan balik pengguna dapat dianalisis untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.
- **Tantangan Baru dalam Akuntabilitas:** Sementara e-government meningkatkan transparansi, ia juga menciptakan tantangan baru dalam hal akuntabilitas. Kompleksitas sistem digital dapat mempersulit pemahaman publik terhadap proses pengambilan keputusan, menuntut bentuk literasi baru bagi masyarakat dan pengawas.
- **Redefinisi Responsivitas:** E-government menggeser ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan kualitas respons pemerintah. Standar responsivitas yang baru menekankan pada kecepatan, akurasi, dan personalisasi layanan, menantang birokrasi untuk terus berinovasi.
- **Akuntabilitas Algoritma:** Dengan meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan dan algoritma dalam pengambilan keputusan pemerintah, muncul kebutuhan

untuk "akuntabilitas algoritma". Ini melibatkan transparansi dalam desain dan implementasi sistem otomatis yang mempengaruhi keputusan publik.

Transformasi ini menuntut redefinisi dan perluasan konsep akuntabilitas dan responsivitas dalam konteks pemerintahan digital. Birokrasi perlu mengembangkan kompetensi baru, mengadopsi praktik manajemen yang lebih agile, dan membangun mekanisme pengawasan yang sesuai dengan era digital untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang terus berkembang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap implementasi OSS-RBA dalam proses perizinan IUPTLS di Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa implementasi OSS-RBA dalam proses perizinan IUPTLS di Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam aspek penyederhanaan prosedur dan peningkatan transparansi. Sistem ini berhasil mengintegrasikan berbagai tahapan perizinan ke dalam satu platform digital, mengurangi kompleksitas dan waktu yang dibutuhkan dalam proses pengajuan izin. Peningkatan transparansi terlihat dari visibilitas real-time terhadap status permohonan dan standarisasi prosedur, meskipun efektivitasnya masih bervariasi tergantung pada konsistensi implementasi di berbagai instansi terkait. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas institusional untuk memaksimalkan manfaat dari sistem ini.

Tantangan utama dalam penerapan OSS-RBA untuk IUPTLS di Jawa Tengah teridentifikasi terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan adaptasi terhadap kompleksitas teknis sektor ketenagalistrikan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan instansi terkait seperti PLN dan Dinas ESDM masih menghadapi hambatan, terutama dalam hal perbedaan interpretasi regulasi dan kepentingan antar lembaga. Adaptasi terhadap kompleksitas teknis sektor ketenagalistrikan juga menjadi

tantangan, khususnya dalam mengakomodasi kebutuhan spesifik dan variasi teknis dalam proyek-proyek ketenagalistrikan, terutama untuk teknologi baru seperti pembangkit listrik tenaga surya on-grid. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas, harmonisasi regulasi, dan penyesuaian sistem terhadap kebutuhan teknis yang spesifik di sektor ketenagalistrikan.

Bagi kalangan akademik, direkomendasikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak implementasi OSS-RBA terhadap efisiensi dan efektivitas perizinan IUPTLS di Jawa Tengah. Studi komparatif antara berbagai daerah di Indonesia juga diperlukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Selain itu, pengembangan model evaluasi yang komprehensif untuk mengukur kinerja sistem OSS-RBA dalam konteks sektor ketenagalistrikan sangat dibutuhkan untuk mendukung perbaikan berkelanjutan.

Regulator di tingkat nasional dan daerah disarankan untuk melakukan harmonisasi regulasi terkait perizinan IUPTLS antara pusat dan daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan implementasi OSS-RBA. Pengembangan standar nasional untuk interoperabilitas sistem dan pertukaran data antar instansi juga sangat penting. Selain itu, regulator perlu merancang dan mengimplementasikan program peningkatan kapasitas yang komprehensif bagi aparatur pemerintah di semua tingkatan, dengan fokus pada kompetensi digital dan pemahaman regulasi terkait OSS-RBA dan sektor ketenagalistrikan.

Para praktisi di bidang energi dan ketenagalistrikan dianjurkan untuk aktif berpartisipasi dalam forum-forum diskusi dengan regulator dan akademisi untuk memberikan masukan terkait kebutuhan teknis dan operasional dalam proses perizinan IUPTLS. Mereka juga disarankan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang sistem OSS-RBA dan berkolaborasi dengan pengembang sistem untuk mengusulkan penyempurnaan yang dapat mengakomodasi kompleksitas teknis proyek-

proyek ketenagalistrikan. Selain itu, praktisi dapat berkontribusi dalam pengembangan panduan praktis penggunaan OSS-RBA untuk sektor ketenagalistrikan yang dapat digunakan oleh pelaku industri.

Masyarakat luas direkomendasikan untuk meningkatkan literasi digital dan pemahaman tentang proses perizinan IUPTLS melalui OSS-RBA. Partisipasi aktif dalam program sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah sangat disarankan. Masyarakat juga didorong untuk memberikan umpan balik konstruktif mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan sistem OSS-RBA, yang dapat membantu perbaikan sistem di masa depan.

Dalam konteks global untuk mendukung UN Sustainable Development Goals 7, direkomendasikan agar implementasi OSS-RBA dalam perizinan IUPTLS diperluas untuk mencakup aspek keberlanjutan dan efisiensi energi. Pengembangan modul khusus dalam OSS-RBA yang dapat menilai dan memfasilitasi proyek-proyek energi terbarukan perlu diprioritaskan. Selain itu, berbagi pengalaman dan praktik terbaik implementasi OSS-RBA dengan negara-negara lain, terutama negara berkembang, dapat mendukung upaya global dalam meningkatkan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bank Dunia. (2020). *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. World Bank Group.

BKPM. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Black, J., & Baldwin, R. (2012). When risk-based regulation aims low: Approaches and challenges. *Regulation & Governance*, 6(1), 2-22.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.

Charmaz, K. (2014). *Constructing grounded theory* (2nd ed.). Sage Publications.

Cordella, A., & Bonina, C. M. (2012). A public value perspective for ICT enabled public sector reforms: A theoretical reflection. *Government Information Quarterly*, 29(4), 512-520.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. (2020). *Potensi Energi Terbarukan di Jawa Tengah*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. (2021). Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467-494.

Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi birokrasi kontekstual*. Gadjah Mada University Press.

Firman, T. (2009). Decentralization reform and local-government proliferation in Indonesia: Towards a fragmentation of regional development. *Review of Urban & Regional Development Studies*, 21(2-3), 143-157.

Hadiarman, R., Sukmawati, A., & Munawar, A. (2022). Implementasi Sistem OSS-RBA dalam Perizinan Usaha di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 145-160.

Hardianto, W. T., Nugroho, R. A., & Suharyanto, H. (2020). Collaborative governance dalam implementasi Online Single Submission (OSS). *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61-80.

Hidayanto, A. N., Ahmadi, A., & Juhardi, U. (2014). Implementation of M-Government in Indonesia: Promise and Challenge. In *Proceedings of the 8th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance* (pp. 316-319).

Hjern, B., & Porter, D. O. (1981). Implementation structures: A new unit of administrative analysis. *Organization Studies*, 2(3), 211-227.

Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3-19.

Institute for Essential Services Reform. (2021). *Akselerasi Energi Terbarukan melalui Penyederhanaan Perizinan*. IESR Policy Brief.

International Renewable Energy Agency. (2022). *Renewable Energy Outlook for Indonesia*. IRENA.

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2021). Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian ESDM. (2009). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- Kementerian Investasi. (2021). Laporan Perkembangan Implementasi OSS-RBA. Kementerian Investasi Republik Indonesia.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2021). Pedoman Pelaksanaan Sistem OSS Berbasis Risiko. Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2022). Strategi Nasional Reformasi Regulasi. Pemerintah Republik Indonesia.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (2nd ed.). Sage Publications.
- Latour, B. (2005). *Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory*. Oxford University Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1984). The new institutionalism: Organizational factors in political life. *American Political Science Review*, 78(3), 734-749.
- Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145-174.
- Meijer, A., & Bekkers, V. (2015). A metatheory of e-government: Creating some order in a fragmented research field. *Government Information Quarterly*, 32(3), 237-245.
- Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2021). The influence of internal organizational factors on open government implementation: A qualitative study of Indonesian government agencies. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 15(2), 161-180.
- OECD. (2020). *Regulatory policy in Indonesia: Towards a whole-of-government approach to regulatory reform*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *OECD Economic Surveys: Indonesia 2021*. OECD Publishing.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2019). *Laporan Kinerja Sistem Informasi Administrasi Perizinan (SIAP) Jateng*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Peters, B. G. (2019). *Institutional theory in political science: The new institutionalism*. Edward Elgar Publishing.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. University of California Press.
- Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada. (2022). *Evaluasi Implementasi OSS-RBA dalam Sektor Ketenagalistrikan*. UGM Press.
- PwC Indonesia. (2018). *Power in Indonesia: Investment and taxation guide* (6th ed.). PwC Indonesia.
- Ramadhan, R. D., & Nugroho, R. A. (2019). Implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 1-15.
- Rothstein, H., Irving, P., Walden, T., & Yearsley, R. (2006). The risks of risk-based regulation: Insights from the environmental policy domain. *Environment International*, 32(8), 1056-1065.
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538-560.
- Sekretariat Negara RI. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Smoke, P. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. *Public Administration and Development*, 35(2), 97-112.
- Sutedi, A. (2015). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Sinar Grafika.
- Transparency International Indonesia. (2022). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021: Peran Digitalisasi dalam Menekan Korupsi*. TII.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- World Bank. (2020). *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. World Bank Group.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.